



PKL: Malioboro Indah Tanpa Perlu Memindah

■ APKLI Kota Yogyakarta Sampaikan Penolakan Relokasi ke DPRD DIY

YOGYA, TRIBUN - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Yogyakarta tetap keberatan atas rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Malioboro. Mereka kemudian menyampaikan 13 pokok pikiran ke hadapan pimpinan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Rabu (15/12).

Ketua DPD APKLI Kota Yogyakarta, Wawan Suhendra, mengungkapkan keberatan itu untuk kesekian kalinya kepada para wakil rakyat. Menurutnya, daya tarik Malioboro terletak pada keberadaan para PKL di sepanjang pedestrian di kawasan itu.

"Kami paham pemerintah ingin mengubah, tetapi mengubah juga tidak harus memindah," katanya, saat audiensi di ruang rapat Komisi B DPRD DIY, Rabu siang.

Dia menambahkan, kota-kota lain berbenah ingin memiliki ruang publik menyerupai kawasan Malioboro. Namun, Pemkot Yogyakarta dan Pemerintah DIY dinilai olehnya justru ingin mengubah wajah kawasan itu dengan memindahkan para PKL di sana.

"Uniknya Malioboro kan kaki limanya, bukan apa-panya. Kenapa Malioboro justru diubah seperti kawasan di Singapura, sementara kota-kota lain ingin seperti Malioboro," terang dia.

Dia menegaskan, apabila pemerintah setempat ingin memiliki kawasan menyerupai Singapura, Wawan meminta sebaiknya pemerintah mencari ruang publik lain yang akan diubah penampilmannya. "Kalau pingin supaya seperti Singapura ya jangan di Malioboro. Ruas jalan lain kan ada. Kota ini kan banyak, artinya ada di Jalan Solo atau di mana," tegas Wawan.

Dijelaskan Wawan, para perwakilan ketua kelompok PKL yang hadir pada Rabu siang di ruang rapat Komisi B di antaranya, Angkringan

TETAP KEBERATAN

- APKLI Kota Yogyakarta tetap keberatan atas rencana relokasi PKL Malioboro.
- Mereka menyampaikan 13 pokok pikiran ke Komisi B DPRD DIY, Rabu (15/12).
- PKL berharap memelihara keindahan Malioboro tanpa harus memindah PKL.
- DPRD DIY masih akan berkoordinasi dengan instansi.

Padma Malioboro, Lesehan Malioboro, Paguyuban Handayani, dan KPPKLY.

Pada intinya, mereka semua tidak ingin adanya pemindahan lokasi berjualan para PKL baik ke gedung eks bioskop Indra, maupun ke bekas gedung Dinas Pariwisata DIY meski itu masih di kawasan Malioboro.

"Harapan kami PKL Malioboro tetap yakin di hatinya tidak ingin dipindah," terang dia.

Mereka tidak keberatan apabila pemerintah setempat hanya melakukan penataan saja, atau tidak sampai memindahkan ke lokasi baru. "Banyak yang membantu kami, Malioboro indah tanpa memindah. Silakan kami bersedia ditata, Pemkot ini maunya bagaimana kami siap. Apakah harus mengubah tampilan atau bagaimana," terang dia.

Merespons
 Sebelum mendatangi Komisi B DPRD DIY, para kelompok PKL itu sudah berkunjung ke Pemkot Yogyakarta dan para legislatif di DPRD Kota Yogyakarta. Akan tetapi, mereka belum mendapatkan kepastian yang diharapkan oleh para PKL tersebut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B, menanggapi, opsi relokasi menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, dirinya belum dapat berkomentar

lebih jauh sebelum melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

"Itu kewenangan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, walaupun next ada kewenangan dari Dinkop UKM DIY," jelasnya.

Dia menjelaskan, dari pemapanan Kepala Dinkop UKM DIY, Dwi menyimpulkan bahwa para PKL Malioboro akan dipindah ke eks gedung bioskop Indra dan eks Dinas Pariwisata DIY.

"Tetapi dua tempat itu kan masih belum siap untuk hari ini. Paling enggak di sana masih butuh perluasan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) angkat bicara soal rencana relokasi PKL Malioboro ke gedung eks Bioskop Indra. Menurutnya rencana ini sudah ada sejak lama.

"Kan sudah lama dulu kan sudah dibangun dari Indra (tempat untuk PKL)," kata Sultan ditemui di Kepatihan Pemda DIY, belum lama ini.

Sultan menjelaskan bahwa kawasan Malioboro ditata untuk mewujudkan sumbu filosofi di kawasan Malioboro sebagai warisan dunia. Seperti diketahui sumbu filosofi Yogya diajukan menjadi salah satu Warisan Budaya Dunia Tak Benda UNESCO. Sumbu filosofi tak lain adalah sumbu lurus yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krayak.

Sultan menjelaskan para PKL juga harus tahu bahwa lokasi yang mereka tempati adalah lahan milik toko di kawasan Malioboro. Sehingga wajar juga kemudian dikembalikan. "Ya saya kira mereka juga harus tahu bahwa sebenarnya tempat jualan itu (lahan) milik toko, bukan milik pemerintah daerah. Karena pemda trotoarnya sudah untuk jalur lambat (pedestrian), mosok ya nggak juga dikembalikan. Toh pindah juga tetap di kawasan Malioboro," katanya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005